

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan yang disusun tiap tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaporkan dalam LKjIP tahun 2023 nanti.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini sebagai penjabaran / pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen ReNstra dimaksud.

Demikian Rencana Kerja tahun 2023 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, Juli 2022

KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP 19660421 199003 2 013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	22
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020	24
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	32
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	35
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja. Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen rencana program / kegiatan yang disusun setiap tahun dan merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja, kedudukan tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan yang secara umum adalah untuk mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang mempunyai anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya tersebut, Dinas PPKB PP dan PA menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai acuan / kerangka kerja dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja tahun 2022.

Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut indikator – indikator sarannya. Selain itu juga diuraikan tentang program / kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilakukan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemrintah Daerah tahun 2022. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 496).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 115).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 116)
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 32);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra, menetapkan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah untuk menjamin keberlanjutan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Magetan, memberikan pedoman bagi Bidang-bidang yang ada di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Magetan dalam rangka mencapai target Renstra. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan Rancangan Rencana Kerja

ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun anggaran 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1

TABEL SISTEMATIKA PENULISAN RENJA RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RKPD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD)
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD.
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun n-2 dan perkiraan capaian n-1, dikaitkan dengan target capaian renstra
2.2	Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu-isu strategis lainnya
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pada masyarakat dan poengumpulan informaoi dan pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tuhan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Derah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
3.3	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan yang akan dilaksnakan pada tahun direncanakan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
Memberikan informasi program &Kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya		
BAB V PENUTUP		
Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu Juga dicantumkan tanggal, nama kepala Perangkat Daerah dan Stempel		

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mengajukan usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Survey Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

TABEL 2.1

TABEL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	3. Administrasi Umum Perangkat daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (DAK Fisik)
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk 1. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
	2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

	<p>3. Pengendalian Program KKBPK</p>
	<p>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 3. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	<p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 5. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 6. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 7. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 8. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
	<p>4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

	<p>3. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>
	<p>2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>1. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>3. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</p>

Hasil Evaluasi Renja tahun 2021, capaian Renstra dan proyeksi pencapaian Renja 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PPKB PP dan PA
Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %	100%	-	100%	74.51%	74.51%	100%	100%	100%
2.14.0 2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Ketersediaan data kependudukan	100%	-	100%	99.56%	99.56%	100%	100%	100%
2.14.0 2.2.01. 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	33.33%
2.14.0 2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data kependudukan	100%	-	100%	98%	98%	100%	125.85%	125.85%
2.14.0 2.2.02. 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	33.33%
2.14.0 2.2.02.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Keluarga	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	33.33%

11										
2.14.0 2.2.02. 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dukungan Pembiayaan Pengelolaan BOKB dan Penurunan Stunting	24 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	25%
2.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR	100%	-	100%	46.50%	46.50%	100%	117.43%	117.43%
2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		100%	-	100%	94.53%	94.53%	100%	126.32%	126.32%
2.14.0 3.2.01. 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	24 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50%
2.14.0 3.2.01. 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase Dukungan Manajemen BOKB dan Media KIE	100%	-	100%	93.19%	93.19%	-	100%	100%
2.14.0 3.2.01. 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Proram KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Prosentase Pertemuan Rapat Koordinasi	100%	-	-	-	-	100%	25%	25%
2.14.0 3.2.01. 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang Mendapat Dukungan Operasional Kegiatan	18 balai peny	-	-	-	-	18 balai peny	18 balai peny	100%
2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Penyelenggaraan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	117.83%	117.83%
2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		100%		100%	99.75%	99.75%	100%	127.50%	127.50%

2.14.0 3.2.02. 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/ Sub PPKBD	100%		100%	99.72%	99.72%	100%	121.33%	121.33%
2.14.0 3.2.02. 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	24bulan		-	-	-	-	-	-
2.14.0 3.2.02. 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi honorarium (dan pembinaan)	4134 Orang		1378 Orang	1378 Orang	100%	1378 Orang	2756 Orang	66.67%
2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		73.02%		73.02 %	73.02 %	100%	73.02%	73%	100%
2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang Terdistribusi Alokasi	37 faskes		37 faskes	37 faskes	100%	37 faskes	37 faskes	100%
2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	4972 akseptor		200 akseptor	200 akseptor	100%	2386 akseptor	200 akseptor	4.02%
2.14.0 3.2.03. 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	60 kasus		20 kasus	20 kasus	100%	20 kasus	20 kasus	33.33%
2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 unit		24 unit	24 unit	100%	19 unit	24 unit	55.81%
2.14.0 3.2.03. 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah calon peserta KB yang mendapatkan Pelayanan KIE	210 orang		70 orang	70 orang	100%	70 orang	75 orang	35.71%

2.14.0 3.2.03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Calon Akseptor yang terlayani KB MKJP	4591 akseptor		4591 akseptor	4591 akseptor	100%	37 faskes	4591 akseptor	100%
2.14.0 3.2.03. 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta Papsmeas yang terlayani	225 akseptor		225 akseptor	225 akseptor	100%	225 akseptor	250 akseptor	111.11%
2.14.0 3.2.03. 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Mendapat Biaya Operasional	3500 Peserta		18 balai peny	18 balai peny	100%	-	3500 Peserta	100%
2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		73.02 %		73.02 %	73.02 %	100%	73.02 %	73.02 %	100%
2.14.0 3.2.04. 01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 kegiaran		3 kegiaran	3 kegiaran	100%	3 kegiaran	3 kegiaran	100%
2.14.0 3.2.04. 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Prosentase biaya operasional kegiatan KKBPK di Kampung KB	100%		100%	92.91%	92.91%	3 kegiaran	101%	101%
2.14.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	100%		100%	97.10%	97.10%	100%	101.54%	101.54%
2.14.0 4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%		100%	97.08%	97.08%	100%	101.55%	101.55%
2.14.0 4.2.01. 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk dan mendapatkan pembinaan	12 Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok	100%	4 Kelompok	5 Kelompok	41.67%

2.14.0 4.2.01. 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja	12 Kelompok		20 paket	20 paket	100%	4 Kelompok	20 paket	166.67%
2.14.0 4.2.01. 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Biaya Operasional	235 kader		235 kader	235 kader	100%	235 kader	270 kader	38.30%
2.14.0 4.2.01. 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pemberian Biaya Operasional Penanganan stunting	100%		100%	96.68%	96.68%	-	96.68%	96.68%
2.14.0 4.2.01. 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	360 Orang		120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	140 Orang	38.89%
2.14.0 4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65%		65%	65%	65%	65%	65%	100%
2.14.0 4.2.02. 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pertemuan dalam rangka Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	160 orang		80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	50%
2.14.0 4.2.02. 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	160 orang		80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	50%

2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan	80 skor		80%	80%	100%	80%	80%	100%
2.08.0 3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80 skor		80%	80%	100%	80%	80%	100%
2.08.0 3.2.03. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan yang difasilitasi dan didampingi	2 Dokumen		80%	80%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
2.08.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA	76%		76%	76%	100%	76%	76%	100%
2.08.0 6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		76%		76%	76%	100%	76%	76%	100%
2.08.0 6.2.01. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 150 orang dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
2.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta	100%		100%	99.20%	99.20%	100%	100%	100%
2.08.0 2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	99.98%	99.98%	100%	100%	100%
2.08.0 2.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	33.33%
2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		10%		10%	10%	10%	43%	10%	100%

2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi perempuan	120 orang		40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	33.33%
2.08.0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	-	-
2.08.0 7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	-	-
2.08.0 7.7.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM pada masyarakat	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	-	-
2.08.0 7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	27 orang		-	-	-	27 orang		
2.08.0 7.2.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang ditangani	27 orang		-	-	-	27 orang		
2.08.0 7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	3 kegiatan		-	-	-	3 kegiatan		
2.08.0 7.2.03. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Kasus	3 kegiatan		-	-	-	3 kegiatan		
2.14.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor		80 skor	80 skor	100%	80 skor	80 skor	100%
2.14.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42 dokumen		14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	17 dokumen	41%
2.14.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	24 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	11 dokumen	45.83%

2.14.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	18 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	33.33%
2.14.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	84.28%	84.28%	100%	100%	100%
2.14.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji	26 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	76.92%
2.14.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	24 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	2 dokumen	2 dokumen	50%
2.14.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 skor	-	80 skor	80 skor	100%	80 skor	80 skor	100%
2.14.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bulan	-	12 bulan	9 bulan	75%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80 skor	-	80 skor	80 skor	100%	-	-	-

2.14.0 1.2.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
2.14.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 skor	-	80 skor	80 skor	100%	80 skor		80 skor
2.14.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	18 bulan	50%
2.14.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 skor		80 skor	80 skor	100%	80 skor		100%
2.14.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	36 bulan		3 unit	3 unit	100%	12 bulan	9 unit	25%
2.14.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	36 bulan		5 unit	5 unit	100%	12 bulan	11 unit	30.56%
2.14.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan yang direhabilitasi (Dak Fisik), jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor	24 unit		5 unit	5 unit	100%	19 unit	5 unit	20.83%

2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas PPKB PP dan PA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil Pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB PP dan PA sebagaimana tabel berikut :

TABEL. 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

No	INDIKATOR	SPM/STAN DART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
I	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	-	-	93,25	93,30	93,35	93,45	93,55	93,36	93,35	93,45	93,55	
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	61,35	61,36	61,37	61,38	61,39	61,36	61,37	61,38	61,39	
3	Rasio Kekerasan terhadap anak	-	-	0,03	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05	0,06	0,06	0,04	
II	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	Anka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,168	0,20	0,19	0,18	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,10	2,15	2,14	2,13	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	-	73,45	73,50	74,00	74,60	77,30	72,98	76,90	77,10	77,30	
3	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	20,10	20,30	20,50	20,80	21,00	24,64	20,50	20,80	21,00	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengaturan Kelahiran melalui Kesertaan ber KB

Di Kabupaten Magetan, pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana telah berhasil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Magetan dan terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB dimana jumlah perempuan sebagai akseptor 97.86% dibandingkan akseptor laki-laki sebesar 2.14% .

Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan :

- (1) Sosialisasi dan pembinaan tentang Pemakaian Alat Kontrasepsi Lebih banyak terhadap perempuan,
- (2) Pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada kepada laki-laki,
- (3) Keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki,
- (4) Belum adanya kesepakatan ulama tentang masalah MOP,
- (5) Kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki dalam hal memutuskan partisipasi untuk ber KB.

Rendahnya kesadaran dan pelaksanaan KB laki-laki maka Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan Balai Pemyuluhan KB seKabupaten Magetan untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia.

2.3.2 Kesadaran Tentang Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja dan Ibu-ibu

Di Kabupaten Magetan hampir di setiap kecamatan sudah terdapat kelompok-kelompok PIK Remaja baik yang dikelola oleh Desa maupun Sekolah-sekolah. Tetapi akibat kurangnya pembinaan serta fasilitas pendukung yang kurang memadai, maka kelompok PIK Remaja ini belum berfungsi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kenakalan remaja dan penyimpangan seksual di kalangan remaja dan siswa.

Untuk Ibu-ibu atau PUS yang sudah aktif seksual ternyata masih banyak yang belum paham tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim (pap smear). Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua kecamatan melaksanakan kegiatan pap smear diakibatkan animo masyarakat terhadap kegiatan pap smear masih rendah. Oleh karena itu ke depan perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PA dengan lintas sektor untuk menyukseskan program pap smear ini.

2.3.3 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Di kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok Bina Keluarga Balita yang tersebar di setiap Posyandu. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya fungsi kelompok BKB dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebabkan kader BKB masih banyak yang belum paham tentang fungsi BKB itu sendiri. Selain itu honor kader BKB oleh pemerintah sangat minim dan belum merata, sehingga dalam bekerja sifatnya hanya sukarela saja. Ke depan Dinas PPKB PP dan PA akan memberikan fasilitas BKB Kit untuk semua kelompok BKB yang ada dan direncanakan setiap kelompok BKB akan mendapat dana operasional.

2.3.4 Peningkatan Keadilan Gender serta Peningkatan Rasa Aman Bagi Perempuan dan Anak.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran ini antara lain adalah pada kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah diadakan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak, diharapkan terjadi

pemahaman yang baik tentang Undang-undang kepada masyarakat atau peserta sosialisasi. Tetapi kenyataannya masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran ekonomi di Kabupaten Magetan. Hal ini perlu dikaji ulang tentang mekanisme sosialisasi UUPA juga peserta sosialisasi.

Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah banyak masyarakat korban tindak kekerasan merasa malu untuk melaporkan ke pihak berwenang, sehingga kasus KDRT semakin meningkat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal Perangkat Daerah atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Pada Rancangan Awal Perangkat Daerah ini, belum ada perubahan pagu anggaran baik program dan kegiatan setelah direview.

TABEL. 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

NAMA SKPD : DINAS PPKB PPPA KABUPATEN
MAGETAN

PEMUTAKHIRAN 2023 (SESUAI KEPMEN 050 - 5889 TAHUN 2021)				RANCANGAN AWAL 2022	RANCANGAN AWAL 2023	KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	-	-	
01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.000.000	50.000.000	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	50.000.000	50.000.000	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.272.509.844	1.838.463.319	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000	15.000.000	
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	8.190.650	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.183.500	198.793.020	
01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	18.000.000	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	17.248.250	

01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.500.000	14.000.000	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	3.540.000	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000	28.500.000	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	537.600.000	788.614.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah					
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	75.000.000	75.000.000	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40.000.000	40.000.000	
01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	322.854.832	150.000.000	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43%	-	-	
02.08.02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
02.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	
02.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					

02.08.02.2 .02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan				
02.08.03.2 .03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
02.08.03.2 .03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA	76%	-	-	
02.08.06.2 .01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
02.08.06.2 .01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100%	-	-	
2.14.02.2. 01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
2.14.02.2. 01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	270.000.000	270.000.000	
2.14.02.2. 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.14.02.2. 02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000	

2.14.02.2. 02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	73%	-	-	
2.14.03.2. 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
2.14.03.2. 01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	12 bulan	100.000.000	100.000.000	
2.14.03.2. 02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
2.14.03.2. 02.03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	205.000.000	205.000.000	
2.14.03.2. 02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1378 Orang (PPKBD 235 Orang dan Sub. PPKBD 1143 Orang)	982.000.000	982.000.000	
2.14.03.2. 03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota					
2.14.03.2. 03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	200 Orang	100.000.000	100.000.000	
2.14.03.2. 03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20 Laporan	25.000.000	25.000.000	
2.14.03.2. 03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	70 Orang	20.000.000	20.000.000	
2.14.03.2. 03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	225 Orang	120.000.000	120.000.000	

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBKB	3 Organisasi	70.000.000	70.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73%	-	-	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	4 kelompok	65.000.000	65.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	235 Orang	210.000.000	210.000.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120 Laporan	40.000.000	40.000.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan					

	Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Laporan	30.000.000	30.000.000	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Organisasi	30.000.000	30.000.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Lpporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	
JUMLAH TOTAL				7.571.148.176	6.342.349.239	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Renja tahun 2023 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang diketahui oleh Camat dan melalui Musrenbang Kecamatan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB PP DAN PA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan.

Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagai Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai PERBUP Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua sektor pembangunan serta penilaian pelaksanaan.

Program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak, yang selama ini masih banyak mengalami kendala akibat bias gender yang dapat ditemukan pada semua bidang kehidupan, Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan bahkan mengambil porsi sangat penting dalam pembangunan manusia. Kesejahteraan akan dapat tercapai apabila kualitas hidup perempuan diperhatikan.

Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) berupaya juga untuk mengoptimalkan perempuan dalam keikut-sertaannya di dalam pembangunan. Melalui Peraturan Pemerintah No 47/2009, Tugas pokok dan fungsi Kementerian PP dan PA adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan PA;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang PP dan PA.

Arah Prioritas Pembangunan Bidang PP dan PA di Daerah adalah:

1. Pelaksanaan PUG, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah dengan piloting beberapa bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan pekerjaan umum.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Tumbuh kembang Anak
4. Pengembangan Kota Layak Anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Program Nasional merupakan bagian Integral dari Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015 disebutkan bahwa Program KBN merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan, dimana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2022, dimana

Program KKBPK masuk didalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) pada butir ke 5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” pada fokus pertama (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana). Seluruh arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga harus mengacu pada butir ke 5 Nawacita tersebut dan telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2022 serta telah dikembangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2022.

Penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga telah tertuang didalam RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2022 dan pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN/Renstra tersebut (tahun 2015) BKKBN dituntut untuk dapat mencapai target/sasaran diantaranya: ¹⁾ Persentase Laju pertumbuhan Penduduk 0,64, ²⁾ Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 1,98, ³⁾ Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 66,8 persen (all method), ⁴⁾ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,60 persen, ⁵⁾ Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 30,35 per 1000 kelahiran, ⁶⁾ Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 9,7 persen.

Penajaman-penajaman yang harus dilakukan tentunya juga harus tetap mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Bidang Kependudukan dan KB yang terdapat pada Buku I RPJMN 2015-2022 dimana BKKBN bertanggung jawab untuk melakukan:

1. Penguatan dan pepaduan kebijakan kependudukan, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana program KKBPK, serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-

KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KKBPK
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKBPK melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/ kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja adalah :

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesadaran gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan
3. Meingkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Target sasaran Renja Dinas PPKB PP dan PA tahun 2023 :

Tabel 3.1
Target Sasaran Renja Dinas PPKB PP dan PA Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengendalian Penduduk	1.1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.18
				1.1.1	Fotal Fertility Rate (TFR)	2.13
				1.2.1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	21.00
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat melalui Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	2.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,39
				2.1.1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	78,60
				2.2.1	Prosentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,04
2.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak					

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021;
- b. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021;
- c. Hasil review terhadap rancangan Perangkat Daerah tahun 2021;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- f. Isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi selama tahun 2021 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2022

Dengan memperhatikan poin-poin diatas, maka program/ kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB PP dan PA pada tahun 2023 adalah sebagaimana disampaikan pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan SKPD dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magetan

DINAS PPKB PP DAN PA KABUPATEN MAGETAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RANCANGAN AWAL 2022	RANCANGAN AWAL 2023	KETERANGAN
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	-	-	
01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.000.000	50.000.000	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	50.000.000	50.000.000	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.272.509.844	1.838.463.319	
01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000	15.000.000	
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	8.190.650	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.183.500	198.793.020	
01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	18.000.000	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	17.248.250	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.500.000	14.000.000	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	3.540.000	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000	28.500.000	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	537.600.000	788.614.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah					
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	75.000.000	75.000.000	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40.000.000	40.000.000	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	322.854.832	150.000.000	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43%	-	-	
02.08.02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
02.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	
02.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
02.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan				
02.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
02.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA	76%	-	-	

02.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
02.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100%	-	-	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	270.000.000	270.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	73%	-	-	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	12 bulan	100.000.000	100.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
2.14.03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	205.000.000	205.000.000	

2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1378 Orang (PPKBD 235 Orang dan Sub. PPKBD 1143 Orang)	982.000.000	982.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota					
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	200 Orang	100.000.000	100.000.000	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20 Laporan	25.000.000	25.000.000	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	70 Orang	20.000.000	20.000.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	225 Orang	120.000.000	120.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBKB	3 Organisasi	70.000.000	70.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73%	-	-	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					

2.14.04.2.01.0 1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	4 kelompok	65.000.000	65.000.000	
2.14.04.2.01.0 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	235 Orang	210.000.000	210.000.000	
2.14.04.2.01.0 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120 Laporan	40.000.000	40.000.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.02.0 2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Laporan	30.000.000	30.000.000	
2.14.04.2.02.0 3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Organisasi	30.000.000	30.000.000	
2.14.04.2.02.0 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Lpporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	
JUMLAH TOTAL				7.571.148.176	6.342.349.239	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja ini disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra Dinas PPKB PP dan PA 2018 – 2023 secara tahunan. Rancangan Rencana Kerja mempunyai nilai guna yang penting karena keberhasilan Visi, Misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2023 dan Perjanjian Kinerjanya. Selain itu Rancangan Akhir Rencana Kerja ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Tupoksi dan pencapaian kinerja selama tahun 2023nanti.

Kedepan diharapkan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Magetan, Juli 2022

KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP 19660421 199003 2 013